

Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Desa di Kampung Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke

Oleh:

¹ Fransin Kontu, ² Umiyati Haris, ³ Stefanes Pesak, ⁴ Siti Nurjanah, ⁵ Muhammad Ardiansyah

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Email : fransin@unmus.ac.id

Abstract

Program BLT merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan dalam rangka mengurangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 dan permasalahan kemiskinan struktural. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Urumb yang meliputi tiga tahap utama yaitu identifikasi dan verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM), penyaluran dana, serta pelaporan dan evaluasi. Hasil wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa proses identifikasi KPM menghadapi kendala terkait dengan kurangnya akurasi data sosial dan minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (Mus�am). Penyaluran dana dilakukan secara tunai dengan nominal Rp300.000 per KPM per bulan, namun penyaluran dilakukan secara triwulanan. Pelaporan program mengalami kendala teknis dikarenakan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Survei terhadap 55 KPM menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori sedang (60%), dengan faktor penentu ketepatan sasaran (75%) dan kemudahan akses. Secara sosial ekonomi, program ini berhasil memenuhi kebutuhan dasar masyarakat namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun kemandirian ekonomi. Rekomendasi yang diberikan antara lain pemutakhiran data sosial berbasis digital, peningkatan peran serta masyarakat, pemberian pelatihan teknis bagi perangkat desa, dan mengombinasikan program BLT Desa dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi. Faktor geografis dan budaya setempat menjadi tantangan yang perlu dikelola melalui pendekatan berbasis masyarakat, sedangkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pendampingan perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan program.

Kata Kunci: BLT Desa, ketepatan sasaran, dampak sosial ekonomi, pelaporan program, pemberdayaan masyarakat.

Abstrac

The BLT program is one of the Indonesian government's policies to provide social assistance to poor and vulnerable communities in order to reduce the economic impact of the COVID-19 pandemic and structural poverty problems. This study analyses the implementation of the Village Direct Cash Assistance (BLT) Program in Urumb Village, which includes three main stages: identification and verification of beneficiary families (KPM), distribution of funds, and reporting and evaluation. The results of interviews and document analysis show that the KPM identification process faces obstacles related to the lack of accuracy of social data and minimal community participation in village deliberations (Mus�am). The distribution of funds is carried out in cash with a nominal value of IDR 300,000 per KPM per month, but the distribution is carried out quarterly. Program reporting experiences technical obstacles due to the limited capacity of village officials. A survey of 55 KPM showed that the level of community satisfaction was in the moderate category (60%), with determining factors such as targeting accuracy (75%) and ease of access. Socio-economically, this program has succeeded in meeting the basic needs of the community but has not had a significant impact on increasing income or economic independence. Recommendations include updating digital-based social data, increasing community participation, providing technical training for village officials, and combining the Village BLT program with economic empowerment initiatives. Local geographic and cultural factors are challenges that need to be managed through a community-based approach, while the role of local government in supervision and assistance needs to be increased to ensure the sustainability of the program.

Keywords: *Keywords: Village BLT, targeting accuracy, socio-economic impact, program reporting, community empowerment.*

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Situasi pandemi ini memunculkan tantangan baru di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan dan ekonomi. Masyarakat yang tergolong miskin dan rentan menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan kehilangan sumber penghidupan sebagai salah satu dampaknya yang signifikan. Menghadapi krisis ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, salah satunya adalah Program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa atau yang lebih dikenal dengan BLT Desa. Program ini dirancang sebagai bentuk respons terhadap kondisi darurat, dengan tujuan utama memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin yang terdampak pandemi khususnya yang berdomisili di Desa-Desa.

Program BLT Desa adalah salah satu upaya strategi pemerintah untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi, khususnya rumah tangga miskin, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam Pasal 18A huruf ayat (2) diatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di Desa yang berhak sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2024 BLT Desa disalurkan secara berkala dengan nominal Rp300.000,- per KPM per bulan.

Meskipun program ini memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul dalam implementasi BLT Desa di lapangan, seperti masalah validasi data penerima, mekanisme distribusi yang tidak optimal, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tantangan geografis, tingkat pendidikan masyarakat, dan minimnya akses terhadap informasi turut memengaruhi efektivitas program ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan BLT Desa menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi untuk perbaikan ke depan.

Kabupaten Merauke, sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam dan populasi yang tersebar, menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan BLT Desa. Kampung Urumb, yang terletak di Distrik Semangga, merupakan salah satu kampung yang melaksanakan program BLT Desa sejak tahun 2020. Dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan infrastruktur yang terbatas, pelaksanaan program BLT Desa di Kampung Urumb menjadi sangat penting untuk menjaga kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program BLT Desa di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis berbagai aspek pelaksanaan program, termasuk mekanisme distribusi, transparansi, akuntabilitas, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program BLT Desa di masa mendatang, khususnya di wilayah dengan karakteristik serupa. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan dimensi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BLT Desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BLT Desa menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program ini dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih jauh lagi, konteks geografis dan budaya di Kampung Urumb memberikan dimensi unik dalam pelaksanaan program ini. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan aksesibilitas yang terbatas, distribusi bantuan menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, juga berpengaruh terhadap proses implementasi program. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan BLT Desa di Kampung Urumb, serta untuk merumuskan strategi yang relevan dengan kondisi lokal. Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti pelatihan bagi aparatur desa, penyediaan panduan teknis, serta pengawasan oleh pihak berwenang. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana intervensi pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program BLT Desa di Kampung Urumb, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dalam kerangka penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk aparat desa, penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Selain itu, analisis dokumen dan observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program BLT Desa di Kampung Urumb. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BLT Desa, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat di Kampung Urumb. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap literatur akademik mengenai evaluasi program bantuan sosial, khususnya di konteks pedesaan yang memiliki karakteristik geografis dan budaya yang beragam.

Penelitian ini juga relevan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan pertama, yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dengan mengevaluasi

pelaksanaan BLT Desa, penelitian ini berkontribusi dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kelompok miskin dan rentan, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan dampak program di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan bagaimana Program BLT Desa dilaksanakan di Kampung Urumb, termasuk kendala, keberhasilan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti juga mendeskripsikan proses pelaksanaan program serta persepsi penerima BLT Desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari wawancara, survei, dan observasi lapangan di Kampung Urumb. Informan utama adalah: penerima BLT, Aparatur Kampung. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi pemerintah, seperti laporan dari Kementerian Sosial, BPS, atau dokumen kebijakan terkait BLT. Juga, literatur dari buku, jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan BLT di Indonesia dan pelaksanaannya di daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Program BLT DESA

Mekanisme pelaksanaan Program BLT Desa di Kampung Urumb dimulai dengan proses identifikasi dan verifikasi keluarga penerima manfaat (KPM). Aparatur desa bertanggung jawab menyusun data awal calon penerima bantuan berdasarkan pendataan sosial yang dilakukan. Data tersebut kemudian dibahas dan diverifikasi melalui Musyawarah Kampung (Mus kam) yang melibatkan masyarakat setempat. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria penerima manfaat yang telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Hasil dari Mus kam ini akhirnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung yang mengatur siapa saja yang berhak menerima bantuan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala terkait akurasi data penerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pembaruan data sosial masyarakat, yang membuat data yang digunakan untuk verifikasi tidak selalu mencerminkan kondisi terkini. Selain itu, kurangnya informasi yang diberikan oleh dinas terkait menjadi faktor penghambat dalam memperoleh data yang valid dan terupdate. Partisipasi masyarakat dalam Mus kam juga belum maksimal, yang mengakibatkan beberapa perbedaan pendapat dan ketidaksesuaian mengenai daftar KPM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, penyaluran dana BLT Desa di Kampung Urumb dilakukan secara langsung kepada KPM melalui dua mekanisme, yaitu tunai atau transfer bank. Karena keterbatasan akses layanan perbankan di kampung tersebut, seluruh dana disalurkan secara tunai. Besaran bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan pemerintah, yakni sebesar Rp 300.000,- per KPM per bulan, namun penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini mempengaruhi efektivitas penggunaan dana oleh masyarakat, karena adanya penundaan dalam distribusi yang seharusnya dapat memberikan dukungan lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Setelah penyaluran, aparatur desa diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai realisasi penyaluran BLT Desa. Laporan ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan. Meskipun demikian, berdasarkan analisis dokumen, tidak semua laporan disusun dan disampaikan tepat waktu. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas teknis aparatur desa dalam mengelola administrasi, yang menghambat proses pelaporan yang efisien dan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

Tingkat Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 55 KPM BLT Desa tahun 2024, tingkat kepuasan masyarakat terhadap program ini menunjukkan hasil yang berada dalam kategori sedang, dengan 60% responden merasa puas. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek dalam pelaksanaan program.

Ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa BLT Desa telah disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Meskipun demikian, masih ada keluhan mengenai ketidaktepatan dalam penetapan penerima manfaat. Beberapa keluarga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan tidak terdaftar sebagai KPM, sementara beberapa keluarga yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima. Ketidakakuratan data ini menyebabkan ketidakpuasan sebagian masyarakat, karena mereka merasa bantuan tidak sampai pada mereka yang lebih membutuhkan.

Kemudahan akses juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan. Mayoritas responden mengapresiasi proses penyaluran yang dianggap sederhana dan mudah dijangkau. Proses distribusi yang langsung disalurkan tunai dianggap efektif dalam menghindari komplikasi administrasi yang mungkin timbul jika menggunakan sistem transfer bank. Namun, ada sebagian kecil yang mengeluhkan tantangan terkait jarak tempuh yang cukup jauh untuk mengambil bantuan. Aksesibilitas menjadi kendala, terutama bagi mereka yang tinggal di lokasi yang lebih terpencil di Kampung Urumb. Meskipun demikian, keluhan terkait hal ini tidak mengurangi apresiasi mereka terhadap kemudahan secara keseluruhan.

Dampak sosial dan ekonomi dari BLT Desa sangat terasa, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebanyak 85% responden merasa bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya untuk kebutuhan pangan. Bantuan ini membantu mereka untuk bertahan hidup selama masa sulit, terutama di tengah pandemi. Namun, dampaknya terhadap peningkatan pendapatan atau kesempatan usaha sangat terbatas. Sebagian besar responden mengakui bahwa bantuan ini lebih bersifat konsumtif dan tidak mampu memberikan dorongan yang cukup untuk meningkatkan kemandirian ekonomi atau membuka peluang usaha baru. Oleh karena itu, meskipun kebutuhan dasar dapat dipenuhi, potensi bantuan untuk mendorong perbaikan kondisi ekonomi jangka panjang masih sangat minim.

Analisis Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program bantuan sosial, termasuk Program BLT Desa. Di Kampung Urumb, meskipun mayoritas penerima manfaat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, terdapat sejumlah keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan namun tidak terdaftar. Masalah ketepatan sasaran ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama.

Salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran adalah minimnya pembaruan data sosial yang digunakan untuk proses identifikasi penerima manfaat. Data yang digunakan dalam pendataan masyarakat bersifat statis dan tidak mencerminkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara dinamis. Sebagai contoh, banyak keluarga yang sebelumnya masuk dalam kategori mampu, namun karena kondisi ekonomi mereka yang berubah akibat pandemi, mereka menjadi keluarga miskin yang sangat membutuhkan bantuan. Namun, karena data yang ada tidak diperbarui, mereka tidak teridentifikasi sebagai calon penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan temuan Susanti (2020), yang menyatakan bahwa ketidakakuratan data sering kali menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial.

Selain itu, keterbatasan partisipasi masyarakat juga turut mempengaruhi ketepatan sasaran dalam penentuan keluarga penerima manfaat. Proses pendataan yang kurang melibatkan masyarakat secara langsung menyebabkan beberapa kondisi keluarga miskin tidak teridentifikasi dengan baik. Masyarakat setempat lebih memahami kondisi ekonomi keluarga mereka, tetapi jika mereka tidak terlibat dalam proses verifikasi data melalui Musyawarah Desa (Musdes), maka informasi tentang keluarga yang membutuhkan bantuan seringkali tidak sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Kurangnya transparansi dan keterlibatan ini mengurangi efektivitas program, karena banyak keluarga yang memenuhi syarat justru terlewatkan dalam pendataan.

Untuk mengatasi masalah ketepatan sasaran ini, salah satu rekomendasi yang dapat diterapkan adalah mengintegrasikan sistem pendataan berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pembaruan data secara real-time, sehingga perubahan dalam kondisi ekonomi masyarakat dapat langsung tercatat dan diproses dengan cepat. Pendekatan ini sudah diterapkan di beberapa daerah lain yang menggunakan aplikasi berbasis data untuk mengelola pendataan dan memastikan bahwa data penerima manfaat selalu akurat dan terbarui (Rahman, 2021). Dengan demikian, pembaruan data bisa dilakukan secara lebih efisien dan efektif, mengurangi risiko ketidakakuratan data yang berkelanjutan.

Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses Musdes juga sangat penting. Dengan memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penetapan keluarga penerima manfaat, potensi eksklusi keluarga yang membutuhkan bantuan dapat diminimalkan. Musdes yang inklusif dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan kondisi keluarga yang kurang mampu namun belum terdaftar, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau klarifikasi terkait data yang ada. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini akan membantu menciptakan proses verifikasi yang lebih transparan dan adil, sehingga ketepatan sasaran dapat lebih terjamin. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan BLT Desa, diperlukan pembaruan sistem pendataan yang lebih dinamis dan

berbasis teknologi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat. Kedua langkah ini dapat memperbaiki akurasi data dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran, serta menjangkau seluruh keluarga miskin yang membutuhkan.

Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program

Transparansi dalam pelaksanaan Program BLT Desa di Kampung Urumb dapat dikatakan cukup baik, karena informasi mengenai kriteria penerima manfaat dan jadwal penyaluran bantuan diumumkan secara terbuka melalui forum desa. Forum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan dan kapan penyaluran bantuan dilakukan. Keberadaan forum desa sebagai wadah informasi memberikan kemudahan bagi warga untuk mengakses detail terkait program tersebut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan tujuan dan mekanisme pelaksanaan BLT Desa. Proses ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan program karena masyarakat dapat langsung memperoleh informasi dan mengawasi jalannya program.

Namun, meskipun transparansi terkait kriteria penerima manfaat dan penjadwalan bantuan sudah berjalan dengan baik, terdapat keluhan dari beberapa tokoh masyarakat terkait kurangnya laporan rinci mengenai penggunaan dana desa secara keseluruhan. Masyarakat menginginkan adanya penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana dana desa, yang mencakup berbagai program bantuan termasuk BLT Desa, digunakan secara keseluruhan. Keluhan ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengumuman terbuka, masyarakat masih merasa kurang mendapatkan informasi detail mengenai alokasi dan penggunaan dana, yang seharusnya dijelaskan secara terperinci dalam laporan keuangan atau kegiatan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada transparansi pada level tertentu, laporan yang lebih rinci tentang penggunaan dana desa masih diperlukan untuk menjamin kepercayaan masyarakat dan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Sementara itu, akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini juga menjadi sorotan, terutama dalam hal pelaporan penggunaan dana dan ketepatan waktu pelaporan. Proses pelaporan masih menjadi tantangan besar bagi aparatur desa di Kampung Urumb. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa laporan tidak disusun dan disampaikan tepat waktu, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan dalam kapasitas administrasi yang dimiliki oleh aparat desa. Ketepatan waktu pelaporan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima oleh KPM dan penggunaannya dapat dipantau dengan jelas. Selain itu, laporan yang disusun dengan teliti dan tepat waktu menjadi dasar untuk evaluasi program dan pengambilan keputusan lebih lanjut. Keterlambatan dalam pelaporan tentu dapat menghambat proses evaluasi, pengawasan, dan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Sebagai langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan BLT Desa, perlu adanya pelatihan teknis yang lebih intensif bagi aparatur desa. Penelitian sebelumnya oleh Widodo (2019) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas administrasi dan pelaporan melalui pelatihan bagi aparatur desa. Dalam konteks Kampung Urumb, pelatihan tambahan dapat difokuskan pada manajemen administrasi keuangan, penggunaan perangkat

lunak untuk laporan digital, dan pemahaman tentang pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan. Dengan adanya pelatihan yang memadai, aparatur desa diharapkan dapat mengelola administrasi program dengan lebih efisien, menyusun laporan secara lebih terperinci dan tepat waktu, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak sosial dan ekonomi dari Program BLT Desa di Kampung Urumb menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Salah satu keberhasilan utama dari program ini adalah kemampuannya dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak, seperti makanan, obat-obatan, serta kebutuhan anak-anak. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian seperti masa pandemi, banyak keluarga yang kehilangan pendapatan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program BLT Desa memberikan bantuan tunai yang langsung dapat digunakan untuk membeli bahan makanan, membayar kebutuhan kesehatan, dan memastikan kelangsungan hidup keluarga. Sebanyak 85% responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan ini telah memberikan dampak yang cukup besar dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat dasar.

Namun, meskipun dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar cukup terlihat, dampak ekonomi jangka panjang dari program ini masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Program BLT Desa memang memberikan bantuan konsumtif yang sangat bermanfaat dalam situasi darurat, tetapi sifat bantuan yang bersifat sementara dan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan langsung membuatnya kurang efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Sebagian besar penerima manfaat hanya dapat mengandalkan bantuan tersebut untuk keperluan konsumsi jangka pendek, tanpa adanya perubahan yang signifikan dalam kapasitas mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar atau membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Dengan kata lain, meskipun bantuan ini membantu mengatasi kelaparan dan kesulitan ekonomi yang mendesak, program ini belum mampu mendorong perubahan struktur ekonomi rumah tangga secara lebih mendalam.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani et al. (2020) juga memberikan temuan yang relevan dengan situasi ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bantuan sosial yang tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga disertai dengan pelatihan keterampilan atau dukungan untuk usaha kecil, memiliki dampak yang lebih berkelanjutan. Dalam hal ini, program BLT Desa dapat dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan usaha kecil, atau pelatihan dalam bidang pertanian dan kerajinan. Dengan adanya pelatihan keterampilan atau dukungan modal usaha, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan tunai, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan mereka di masa depan. Misalnya, pelatihan dalam bidang usaha kecil dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha rumahan atau usaha pertanian yang lebih produktif, yang pada gilirannya akan memperbaiki daya beli mereka dan menciptakan lapangan kerja lokal.

Selain itu, dampak sosial dari program BLT Desa juga terlihat dalam penguatan solidaritas sosial di tingkat komunitas. Pemberian bantuan yang terbuka dan transparan memberikan rasa kebersamaan di antara warga, yang merasa bahwa mereka mendapat perhatian dari pemerintah. Walaupun demikian, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik akan sangat penting agar tidak terjadi ketidakpuasan atau kecurigaan dalam proses distribusi, yang dapat merusak solidaritas tersebut.

Faktor Kontekstual: Geografis dan Budaya

Faktor Faktor kontekstual yang berkaitan dengan kondisi geografis dan budaya di Kampung Urumb memengaruhi secara signifikan pelaksanaan Program BLT Desa. Kampung Urumb terletak di daerah yang terpencil dan memiliki aksesibilitas yang terbatas, yang menjadikannya lebih sulit untuk mendistribusikan bantuan secara efisien. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak atau tidak terhubung dengan baik, serta keterbatasan layanan perbankan, menambah tantangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Proses distribusi bantuan yang biasanya mengandalkan perjalanan darat atau proses administratif lainnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang lebih baik. Hal ini berisiko menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dan potensi terjadinya ketidakmerataan distribusi bantuan.

Masalah geografis ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran distribusi bantuan, tetapi juga menciptakan hambatan dalam penyebarluasan informasi terkait program BLT Desa. Warga yang tinggal di lokasi yang lebih terpencil sering kali tidak mendapatkan informasi dengan cepat atau lengkap mengenai waktu dan tempat distribusi bantuan, yang pada gilirannya dapat menambah kebingungannya dan mengurangi tingkat partisipasi dalam program. Dalam hal ini, penggunaan teknologi yang lebih sederhana, seperti aplikasi berbasis SMS atau radio komunitas, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala distribusi informasi. Teknologi tersebut memungkinkan penyampaian informasi dengan cepat kepada masyarakat yang lebih sulit dijangkau, sehingga mereka dapat lebih siap dan terorganisir ketika menerima bantuan. Selain itu, teknologi sederhana ini juga lebih mudah diakses oleh masyarakat yang tidak memiliki akses internet, menjadikannya lebih inklusif bagi semua lapisan masyarakat di Kampung Urumb.

Selain faktor geografis, struktur sosial dan budaya masyarakat Kampung Urumb juga berperan dalam pelaksanaan BLT Desa. Sebagai masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan tradisi lokal, pendekatan yang mengabaikan budaya setempat dapat memengaruhi keberhasilan program. Masyarakat di Kampung Urumb cenderung memiliki hierarki sosial yang kuat, di mana tokoh adat dan pemimpin lokal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan isu-isu sosial. Dalam konteks ini, jika program BLT Desa tidak melibatkan tokoh adat atau tidak mempertimbangkan norma-norma budaya setempat, program tersebut dapat kurang mendapat legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, melibatkan tokoh adat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi penerima manfaat hingga evaluasi program, akan meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. Tokoh adat dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan

masyarakat, memastikan bahwa program tersebut diterima dan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dihormati.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis budaya ini juga dapat mencakup pengadaptasian mekanisme pelaksanaan program yang sensitif terhadap cara hidup dan kebiasaan lokal. Misalnya, dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, bisa dipertimbangkan apakah kriteria yang ada sesuai dengan kearifan lokal atau apakah ada sistem penilaian lain yang lebih menghargai norma sosial setempat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program dapat diperoleh melalui penghargaan terhadap budaya lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Program BLT Desa. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan dukungan terhadap pemerintah desa, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan arahan yang jelas serta memfasilitasi pelaksanaan program yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, berdasarkan temuan dalam studi ini, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa masih mengalami kendala, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa, khususnya dalam hal penyediaan panduan teknis dan pemantauan yang lebih terstruktur.

Dalam konteks ini, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan desa menjadi sangat krusial. Menurut teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh Edward III (1980), komunikasi yang efektif antarlevel pemerintahan adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa komunikasi yang baik, informasi tentang mekanisme pelaksanaan program, perubahan kebijakan, atau peraturan baru tidak akan sampai dengan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terlibat di lapangan. Hal ini dapat menghambat jalannya program, bahkan menimbulkan kebingungans di tingkat desa. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi antarlevel pemerintahan, baik secara vertikal (antara pemerintah kabupaten dan desa) maupun horizontal (antarinstansi terkait), menjadi sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain komunikasi, pengalokasian sumber daya yang memadai juga merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan BLT Desa. Pemerintah daerah perlu menyediakan dukungan berupa pelatihan teknis bagi aparatur desa, terutama yang terkait dengan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan. Tanpa pelatihan yang memadai, banyak aparatur desa yang kesulitan dalam menyusun laporan yang tepat waktu dan akurat, yang pada gilirannya dapat menunda atau merusak proses pelaporan kepada pemerintah kabupaten. Sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (2019), pelatihan teknis dapat meningkatkan kapasitas administrasi aparatur desa, sehingga mereka lebih mampu mengelola anggaran dan program dengan lebih efisien dan sesuai prosedur.

Pemerintah kabupaten juga perlu menyediakan panduan teknis yang jelas untuk pemerintah desa mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam pelaksanaan BLT Desa, dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Ketidaktahuan atau ketidakjelasan prosedur

dapat menyebabkan kesalahan dalam implementasi, seperti ketidaktepatan sasaran atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dengan memberikan panduan teknis yang terperinci dan memastikan bahwa aparatur desa memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawab mereka, pemerintah kabupaten dapat membantu mengurangi potensi masalah di lapangan.

Penguatan pengawasan juga menjadi salah satu peran utama pemerintah daerah. Tanpa pemantauan yang rutin dan intensif, sulit bagi pemerintah kabupaten untuk mengetahui apakah program BLT Desa telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan yang efektif dapat mencakup kunjungan lapangan, pengecekan langsung terhadap pelaksanaan program di tingkat desa, serta pengawasan terhadap administrasi keuangan dan distribusi bantuan. Hal ini dapat meminimalkan potensi penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaan program.

Untuk mengatasi kendala dalam implementasi program BLT Desa, disarankan agar pemerintah daerah lebih aktif dalam meningkatkan koordinasi dan penyediaan sumber daya. Dengan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan aparatur desa dan memperkuat sistem pemantauan, diharapkan kualitas pelaksanaan program ini akan semakin baik. Selain itu, peningkatan komunikasi antar pemerintah desa dan kabupaten serta penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan juga bisa meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan BLT Desa sangat besar. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan desa, serta dukungan berupa pelatihan, panduan teknis, dan pemantauan yang lebih intensif. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mengurangi kendala-kendala yang ada dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran serta efektif dalam mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Program BLT Desa adalah kebijakan strategis yang bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat di pedesaan akibat pandemi COVID-19. Evaluasi pelaksanaan program ini di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke menunjukkan manfaat signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan obat-obatan. Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Ketepatan sasaran menjadi tantangan utama, di mana beberapa keluarga miskin tidak terdaftar sebagai penerima manfaat karena minimnya pembaruan data dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi. Meskipun transparansi cukup baik, akuntabilitas dalam pelaporan masih perlu ditingkatkan, dengan adanya keterlambatan dalam penyusunan laporan oleh aparatur desa.

Program ini berhasil mengurangi tekanan ekonomi dalam jangka pendek, namun dampaknya terhadap kesejahteraan jangka panjang terbatas karena sifatnya yang konsumtif dan kurangnya program pemberdayaan yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Kendala geografis, seperti aksesibilitas terbatas, serta pengaruh nilai adat setempat juga mempengaruhi pelaksanaan program. Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan desa masih perlu diperkuat, meskipun dukungan teknis dari pemerintah

kabupaten terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas program. Secara keseluruhan, BLT Desa di Kampung Urumb memberikan manfaat, namun masih perlu perbaikan dalam berbagai aspek untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, dan dampak jangka panjang.

Saran penelitian mencakup pembaruan data sosial secara berkala dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi berbasis data, untuk memastikan informasi yang akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam identifikasi dan verifikasi penerima manfaat sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan identifikasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat melalui pelatihan teknis bagi aparatur desa dalam mengelola administrasi dan laporan. Penerapan sistem pelaporan berbasis digital dapat mempercepat pelaporan dan memudahkan pemantauan oleh pihak berwenang. Integrasi program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pengelolaan keuangan, juga perlu diperhatikan untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat. Untuk mengatasi kendala geografis dan budaya, teknologi sederhana seperti aplikasi SMS atau radio komunitas bisa digunakan, dan melibatkan tokoh adat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi program. Pengawasan yang lebih baik dari pemerintah daerah serta koordinasi erat antara pemerintah pusat, kabupaten, dan desa diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang jelas, serta melibatkan pihak ketiga dalam evaluasi, akan memberikan perspektif objektif. Terakhir, edukasi masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme program BLT Desa sangat penting untuk menghindari misinformasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program BLT Desa dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kebijakan bantuan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bazzi, S., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2011). "Evaluating Indonesia's Unconditional Cash Transfer Program." *Asian Economic Journal*, 25(3), 209-235.
- Dewi, S. R., & Darmawan, A. (2021). "Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masyarakat Miskin di Daerah Pedesaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 100-115.
- Dunn, W. N. (2008). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Herawati, I. (2019). "Pengaruh Program BLT terhadap Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus di Daerah Terpencil." *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(1), 23-36.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Program Bantuan Langsung Tunai dalam Masa Pandemi COVID-19. Situs Resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia*. <https://www.kemensos.go.id/blt-pandemi-covid-19>
- Kusumawardhani, N. (2012). "The Social Impact of Cash Transfers: Lessons from Indonesia." *Journal of Development Studies*, 48(9), 1253-1269.
- Midgley, James. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications.

- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. SAGE Publications.
- Setiawan, A., & Widodo, P. (2020). "Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 45-58.
- Suharto, Edi. (2006). *Kebijakan Sosial: Pengantar untuk Memahami Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, G. (1980). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rahman, A. (2021). "Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Selama Pandemi COVID-19." *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 123-134.
- Suryani, T., Nugroho, A., & Wibisono, H. (2020). "Tantangan Implementasi Program Bantuan Sosial di Wilayah Pedesaan." *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(1), 45-56.
- Widodo, J. (2019). *Manajemen Dana Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.